



## Analisis Administrasi Keuangan Sekolah di Era *Society 5.0*

Astri Sukriani Piliang<sup>1</sup>, Izatul Hasanah<sup>2\*</sup>, Ahmad Sabri<sup>3</sup>, Rully Hidayatullah<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Sumatra Barat Pariaman, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [izatulhasanah47@gmail.com](mailto:izatulhasanah47@gmail.com)

**Abstract.** *Financial administration is the process of managing financial resources in an organization or institution. This includes planning, controlling and making decisions regarding the acquisition and use of funds to achieve organizational goals effectively and efficiently. The emergence of information technology is poised to revolutionize the field of education. With the increasingly rapid development of technology, the role of management information systems in maintaining school competitiveness has become very important. To adapt to the demands of Industry 5.0, educational institutions must use portable application-based management information systems to simplify data management. Principals, teachers, students and parents, the system can be customized to meet the unique needs of each school, increase school engagement, and better prepare students for a computer-based world. School financial administration is not only about managing money, but also about ensuring that financial resources support the school's vision, mission and programs in improving the quality of education. This abstract discusses how to manage and organize school finances effectively in educational activities. This research aims to analyze and understand how to overcome financial problems in schools. Overall, school financial administration in the Society 5.0 era must focus on efficient management of funding sources and transparent accountability. Schools need to utilize technology to increase efficiency and accuracy in financial management, while overcoming various problems that arise due to changes in technology and policy. With the right approach, school financial administration can contribute significantly to improving the quality of education and public trust.*

**Keywords:** *Adminiscration finance, Era society 5.0, School.*

**Abstrak.** Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau lembaga. Ini mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait perolehan dan penggunaan dana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Munculnya teknologi informasi siap untuk merevolusi bidang pendidikan. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, peran sistem informasi manajemen dalam menjaga daya saing sekolah menjadi sangat penting. Untuk beradaptasi dengan tuntutan Industri 5.0, institusi pendidikan harus menggunakan sistem informasi manajemen berbasis aplikasi portabel untuk menyederhanakan pengelolaan data. Kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua, sistem ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap sekolah, meningkatkan keterlibatan sekolah, dan mempersiapkan siswa dengan lebih baik menghadapi dunia berbasis komputer. Administrasi keuangan sekolah tidak hanya tentang mengelola uang, tetapi juga tentang memastikan bahwa sumber daya keuangan mendukung visi, misi, dan program-program sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Absatrak ini membahas tentang cara mengelola dan mengatur keuangan sekolah secara efektif dalam kegiatan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana cara mengatasi problematika keuangan pada sekolah.

Secara keseluruhan, administrasi keuangan sekolah di era Society 5.0 harus berfokus pada pengelolaan sumber dana yang efisien dan pertanggung jawaban yang transparan. Sekolah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan, sambil mengatasi berbagai problematika yang muncul akibat perubahan teknologi dan kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, administrasi keuangan sekolah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Administrasi keuangan, Era society 5.0, Sekolah.

## **1. PENDAHULUAN**

Administrasi keuangan sekolah adalah tahap pengolahan keuangan sekolah, yang dimulai dari penerimaan dan dipertanggungjawabkan secara sistematis tentang penggunaan uang (Aulia Akhmad, 2024). Administrasi Keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan/financial, Administrasi keuangan tidak harus selalu berada dalam sebuah lembaga/dinas/instansi yang berkaitan dengan masalah keuangan, namun semua lembaga/dinas/instansi baik swasta maupun pemerintahan pasti mempunyai struktur yang mengelola masalah keuangan, tanpa kecuali (Hendrian, 2022).

Setiap unit kerja, termasuk lembaga pendidikan, memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan keuangan. Di sekolah, keuangan mencakup berbagai pos seperti SPP, gaji, dan biaya operasional. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mendukung pelaksanaan program-program pembelajaran.

Administrasi diartikan sebagai kegiatan menyusun informasi secara sistematis dan mencatat secara tertulis segala kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan hubungannya satu sama lain, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan menyeluruh. dalam hubungannya satu sama lain (Saputro, 2020; Syukur & Setiawan, 2021). Akibatnya, administrasi didefinisikan sebagai tindakan menulis, mentransfer, dan melestarikan informasi (Prastiawan, et al. 2019).

Dalam konteks pendidikan terutama pendidikan administrasi keuangan di era society 5.0 pendidikan tidak harus berfokus pada teori tetapi juga dalam pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pendidikan. Di era society 5.0 pendidikan administrasi keuangan harus memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan seperti AI, big data, dan IoT untuk membantu pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan memudahkan administrasi yang ada di sekolah terutama administrasi keuangan sekolah. (Amarullah, 2022).

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode library research, metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi baik yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait tentang administrasi keuangan sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder Dimana penulis menariknya dari sumber yang telah di publikasikan. Dengan demikian penulis mengumpulkan data dan materi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu administrasi keuangan yang meliputi pengertian administrasi keuangan, sumber pembiayaan pada satuan Pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah, pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan problematika keuangan sekolah. Tujuan dari artikel ini untuk membuat deskripsi metode yang digunakan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian baik itu untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi masalah berkaitan dengan administrasi keuangan sekolah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Administrasi Keuangan**

Dalam (Suryana, 2019) secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin terdiri dari dua kata yaitu “ad” dan “ministrare” yang berarti melayani, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan atau pengelolaan. Meski sering diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan administratif seperti tulis-menulis mengetik atau mengarsipkan, makna administrasi sebenarnya lebih luas.

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, administrasi mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sedangkan keuangan adalah istilah yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan kita. Secara sederhana, keuangan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, nilai tukar, dan pengelolaan sumber daya moneter.

Secara terminologis Administrasi keuangan dibedakan menjadi tiga, yaitu pengertian dalam arti sempit, dalam arti luas dan pengertian menurut The Liang Gie.

- 1) Administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.
- 2) Administrasi keuangan menurut arti luas, yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
- 3) Menurut The Liang Gie, Administrasi keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah tata penyelenggaraan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, laporan, dan pertanggung jawaban dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan (Winarni, 2021).

Kegiatan administrasi keuangan sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas finansial lembaga pendidikan, memastikan alokasi dana yang efisien, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan, yang semuanya mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan optimal. Kegiatan administrasi keuangan sekolah melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang ditujukan untuk mengelola dan mengawasi aspek keuangan sekolah dengan cermat. Secara garis besar kegiatan administrasi keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran sekolah.

Dana yang diterima, yang disebut sebagai dana masukan (input), menjalani serangkaian tahapan penting. Setelah melalui proses perencanaan anggaran, dana tersebut diarahkan ke pelaksanaan proses pendidikan (throughput). Selanjutnya, hasil usaha dari seluruh proses tersebut, yang dikenal sebagai output, dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, siklus ini mencerminkan perjalanan dana dari penerimaan awal hingga pertanggungjawaban akhir, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku (Handoko, 2024).

Era Society 5.0 membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Bayangkan orang tua dapat memantau biaya sekolah anak mereka secara real-time, guru dapat mengakses dana dengan mudah, dan sekolah dapat membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Semua ini memungkinkan kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi siswa.

Administrasi keuangan sekolah sedang mengalami transformasi besar. Society 5.0 memungkinkan kita untuk membangun sistem yang lebih modern dan responsif. Tujuan utama dari administrasi keuangan sekolah di era Society 5.0 adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berpusat pada siswa (Muhammad Wali, 2023).

### **Sumber Pembiayaan Pada Satuan Pendidikan**

Dalam (Sudarmono, 2021) pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasirinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan, dalam (Sudarmono, 2021) Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negars modem" mum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan Secara umum terdapat saling keterkaitan pada setiap

komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat rosahun pendidikan) hingga yang makro ftatiomall, yang meliputi sumber-sumber mikro pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasinya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntablillas hasilnya yang diskur dari perubahan-perubahan yang nerjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan pennasalahan yang masih terkait dengan pembisyaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifk mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain urak mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah sata sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sementara menunit Supriyono dalam Dinda (2015), biaya adalah pengorbanan ekanomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan ying berbeda-beda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau harang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

Pendanaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti dana dari pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dana dari lembaga pendidikan itu sendiri dalam (Hasibuan, 2021) berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam era society 5.0 sumber pembiayaan mengalami perluasan seiring

dengan kebutuhan dan model pendidikan yang digunakan terutama pada kurikulum merdeka saat ini yang mengadakan kegiatan P5.

Pembiayaan pendidikan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan bantuan dari berbagai sumber diantaranya:

1) Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah untuk membantu pendidikan dan mengurangi beban masyarakat, terutama yang kesulitan finansial. Program ini memberikan dana langsung kepada sekolah negeri maupun swasta, berdasarkan jumlah siswa dan unit biaya. Tujuannya adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional. Sekolah juga harus memberikan keringanan atau diskon kepada siswa miskin untuk iuran sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) umumnya dijalankan sebagai subsidi yang merata, melibatkan banyak sekolah dan siswa. Namun, ada beberapa sekolah yang menolak program ini, terutama yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan ini diambil oleh pengelola sekolah tanpa melibatkan musyawarah dengan orangtua siswa.

2) Dana BMS

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) mencerminkan perhatian pemerintah terhadap siswa yang mengalami kesulitan finansial. Tujuan pemberian dana ini adalah mencegah agar siswa miskin tidak terhenti dalam mengejar pendidikan akibat kesulitan keuangan, sekaligus memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikannya. Penerima manfaat dari bantuan ini adalah siswa yang dikategorikan kurang mampu atau miskin.

3) Masyarakat

Dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat mencari dan menggali sumber dana dari masyarakat, individu, lembaga, dalam negeri, maupun luar negeri, sesuai dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh perlu digunakan secara efektif dan efisien, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap dana harus digunakan sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

4) Orang Tua/Wali Siswa

Pendanaan ini sering kali dikenal sebagai infak dan SPP bulanan. Ada berbagai jenis pengeluaran keluarga terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, meskipun tidak semua komponen berlaku di setiap sekolah. Data ini menggambarkan sejumlah besar pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua siswa, termasuk hal-hal yang menurut aturan "tidak lagi dibenarkan" dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan melibatkan: 1) Uang Pangkal 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP 3) Biaya Ulangan Tengah Semester 4) Biaya Ulangan Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktikum 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP) 11) Biaya-biaya lainnya.

Bantuan yang diberikan oleh orang tua/wali siswa dalam bentuk tenaga, materi, atau finansial untuk mendukung kegiatan sekolah. Bantuan ini dapat berupa bantuan tenaga untuk kegiatan sekolah, sumbangan bahan makanan untuk kegiatan kantin, atau sumbangan dana untuk kegiatan sosial. Setiap sekolah memiliki kebijakan dan mekanisme sendiri dalam pengumpulan dana dari orang tua/wali siswa. Orang tua/wali siswa memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana yang mereka bayarkan. Sekolah harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana dari orang tua/wali siswa

Menurut (Monita, 2020; Nursobah, 2022), pembiayaan pendidikan berasal dari beberapa sumber yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan melalui UU

RI Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pasal 33-36 pada bab VIII menjelaskan mengenai sumber daya pendidikan yang terdiri dari beberapa kategori:

- 1) Dana pendidikan dari APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang meliputi penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Setidaknya 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan. Sumber dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang ditentukan oleh kondisi keuangan setempat. Dana ini dapat digunakan untuk pendanaan rutin atau pembangunan sesuai kebutuhan sekolah, seperti pembayaran gaji tenaga honorer atau rehabilitasi gedung. Dana APBN digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP).
- 2) Dana penunjang pendidikan berupa beasiswa untuk membantu biaya pendidikan peserta didik. Peningkatan program beasiswa melalui prestasi dan kebutuhan yang diberikan oleh pemerintahan maupun swasta.
- 3) Dana dari Masyarakat, seperti bantuan/sumbangan BP3 (sekarang SPP), digunakan untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transportasi, dan dana pembangunan untuk sarana prasarana, alat belajar, dan media.
- 4) Sumbangan dari Pemerintah Daerah, ialah sumbangan yang diterima sekolah dari pemerintah daerah tempat sekolah berada.
- 5) Bantuan lain-lain. Bantuan yang diterima sekolah dari pihak lain selain APBN, APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan ini bisa berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau bantuan dari luar negeri.

Kemudian Sumber pembiayaan/anggaran pendidikan menurut Habibi et al., (2022) ada 7 yaitu:

1) Anggaran Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional mencakup semua penerimaan kas dari negara yang secara sengaja diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah. Contohnya adalah dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, biaya operasional sekolah (BOS), dan lain-lain.

2) Anggaran Pendidikan Provinsi.

Pendapatan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah berasal dari kas negara. Bantuan ini mencakup buku, hibah untuk pembangunan ruang kelas baru, dana pembangunan kembali sekolah, beasiswa murid, dan banyak lagi.

3) Anggaran Pendidikan Kota/Kabupaten

Pendapatan uang dari pemerintah provinsi untuk sekolah berasal dari kas kota/kabupaten dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti buku, bangku, meja, pelatihan kurikulum, hibah pembangunan kelas baru, rekonstruksi sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

4) Anggaran Komite Sekolah.

Pendanaan dari orang tua siswa dapat berupa uang, buku, seragam, alat tulis, bahan ajar, biaya bulanan, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

5) Anggaran Yayasan

Bantuan yang diberikan oleh pengurus yayasan sekolah untuk program pendidikan sekolah dapat berupa buku, alat tulis, meja, kursi, tanah, bangunan, atau untuk pendanaan rutin seperti beasiswa bagi guru dan siswa.

6) Anggaran Donatur

Sumbangan yang diberikan oleh donatur perorangan atau lembaga tertentu untuk mendukung program sekolah dapat berupa dana, jasa, atau barang. Contohnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, World Association Moslem Youth (WAMY), dan lain-lain.

7) Anggaran Lain

Pendapatan, jasa, dan barang dapat berasal dari penjualan produk buatan siswa, lelang aset sekolah, kegiatan ekonomi koperasi sekolah, dan sumber-sumber lainnya. Pendanaan berbasis keberlanjutan dilakukan dengan program pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekolah untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan penggunaan sumber daya.

### **Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Dalam pengelolaan biaya sekolah, langkah pertama adalah perencanaan penganggaran yang dilakukan melalui Rencana Kerja Madrasah (RKM). RKM merupakan forum untuk menyusun rencana anggaran pembiayaan selama satu tahun ke depan. Sejak awal tahun pelajaran, sekolah telah menyusun rencana anggaran yang fokus pada beberapa aspek, seperti honor guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta pengadaan media atau sarana pembelajaran, termasuk kebutuhan seperti ATK dan perlengkapan lainnya. Proses perencanaan ini menjadi landasan untuk mengelola biaya sekolah dengan efektif dan transparan sepanjang tahun ajaran (Nasution, 2022).

Proses pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Perencanaan merupakan strategi awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi. Dalam perencanaan akan ditentukan tujuan, waktu, tempat dan proses pelaksanaan. Pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Sementara pengawasan mengatur kriterianya. Proses pengelolaan

keuangan di sekolah meliputi perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban.

Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Penerimaan keuangan berasal dari pemerintah, masyarakat dan orang tua peserta didik. Pengeluaran meliputi biaya rutin yakni biaya yang dikeluarkan rutin setiap bulannya dari tahun ke tahun, seperti gaji tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, biaya operasional, biaya pemeliharaan baik gedung maupun sarana prasarana kegiatan pembelajaran. Di samping itu pengeluaran untuk biaya pengembangan yakni biaya pembangunan, perawatan dan perbaikan gedung, penambahan gedung, penambahan bangku dan pengeluaran lain yang bersifat tetap. Pertanggungjawaban keuangan sekolah harus dilaporkan secara rutin dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mulyanti, 2023).

Pengelolaan keuangan sekolah di era digital mengalami transformasi besar. Sistem yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Otomatisasi proses, akses informasi real-time, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Di era society 5.0 membawa pengelolaan keuangan sekolah ke level yang lebih tinggi. Dengan sistem informasi keuangan terintegrasi, transaksi non-tunai, dan analisis data yang canggih, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan transparansi, dan membuat keputusan yang lebih data-driven. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas juga semakin diperkuat. Pengelolaan keuangan sekolah sedang mengalami revolusi, dari sistem manual ke sistem digital yang terintegrasi memungkinkan kita untuk mengelola sumber daya sekolah dengan lebih baik dalam era baru ini. (Dani Karismawan Prakosa, 2022)

Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan

pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

- 1) Perencanaan anggaran
- 2) Strategi mencari sumber dana sekolah
- 3) Penggunaan keuangan sekolah
- 4) Pengawasan dan evaluasi anggaran
- 5) Pertanggungjawaban (Suroto, 2017)

### **Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah**

Pertanggung jawaban keuangan sekolah adalah kegiatan yang dilakukan sekolah untuk memberikan laporan kegiatan program sekolah beserta penggunaan anggarannya. Pertanggung jawaban disusun mulai dari penerimaan dana, penyimpanan dan pemanfaatan keuangan sekolah kepada pihak yang harus mengetahuinya. Bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah dilakukan secara internal dan eksternal. Laporan pertanggung jawaban secara internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya dilakukan oleh: Pertama, pelaksana kegiatan baik itu wakil kepala sekolah maupun panitia pelaksana kepada kepala sekolah terkait dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang disertai dokumentasi dan bukti taunota pembelian, kedua oleh bendahara sekolah kepada kepala sekolah terkait dengan laporan transaksi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan sekolah disertai dengan dokumen pendukung mulai dari laporan harian, bulanan. Dokumen laporan tersebut meliputi: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, realisasi anggaran, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, buku bantu, serta lampiran-lampiran pendukung (Nurhadi, 2023).

Kepala sekolah bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan sekolah secara berkala kepada pemerintah, komite sekolah, masyarakat, dan guru. Laporan ini harus rinci dan transparan, terutama untuk dana yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Tujuannya agar semua pihak mengetahui bagaimana dana sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang

didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

Pertanggung jawaban anggaran rutin, pembangunan, dan PNBK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada wali kota/ bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah.
- 2) Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan I.
- 3) Apabila sampai dengan tanggal 20 bulang berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan II.
- 4) Kelengkapan lampiran SPJ
- 5) Bukti pendukung atau lampiran SPJ.

### **Problematika Keuangan Sekolah**

Dalam pengelolaan keuangan sekolah pun juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Sering kali permasalahan ini membuat manajemen keuangan menjadi lebih rumit. Di antaranya:

- 1) Manajemen keuangan masih dilakukan secara manual. Belum siapnya pengelola keuangan dengan sistem digital mengharuskan pengelola memiliki sifat yang sabar dan rapi dalam penyimpanan arsip keuangan. Padahal dengan sistem digital, pengelolaan keuangan akan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih efisien dalam penyimpanan berkasnya. Penggunaan aplikasi manajemen keuangan sekolah dapat menjadi solusi yang tepat sebagai bagian dari proses digitalisasi sekolah. Pencarian sumber dana sekolah. Pendanaan sekolah juga menjadi salah satu kendala utama bagi sekolah.

Beberapa sekolah, terutama swasta, sering tidak mendapatkan dana BOS atau setidaknya pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Dengan keterlambatan atau ketiadaan ini maka pihak sekolah harus pintar mencari cara dalam menggalang dana, baik dari orang tua siswa, masyarakat maupun mandiri seperti kegiatan usaha sekolah.

- 2) Belum terpenuhinya kompetensi SDM. Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan staf yang berhubungan dengan manajemen keuangan juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini akan mengakibatkan proses perencanaan, penyusunan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran sekolah belum sesuai standar. Terdapat beberapa hal menyebabkan keuangan di sekolah bermasalah yang mungkin bisa diantisipasi sejak awal:
  - a. Manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik
  - b. Adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh oknum terkait
- 3) Kurangnya sumber pemasukan sekolah, hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa (Cholil, 2024).
- 4) Kurangnya adaptasi terhadap teknologi, beberapa sekolah tidak siap untuk melakukan transformasi digital ini dari baik dari segi infrastruktur maupun pelatihan bagi staf keuangan tersebut
- 5) Keterbatasan akses teknologi, tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Sekolah di daerah terpencil atau kurang mampu sering kali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem administrasi yang modern. (Trenggono, 2023)

Dalam perkembangan dunia pendidikan ini dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Karena masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah

sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Setiap manajemen yang terdapat dalam suatu instansi maupun organisasi pastilah tidak luput dari suatu permasalahan. Salah satu bidang administrasi yang rawan timbul permasalahan adalah administrasi keuangan. Diantara masalah- masalah tersebut yang sering terjadi adalah, penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi), membebankan pembiayaan kepada siswa didik, pelaporan keuangan yang penuh manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan lain sebagainya (Sianturi, 2020).

#### **4. SIMPULAN**

Administrasi keuangan sekolah adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas keuangan sekolah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penggunaan dana sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi keberlangsungan operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Administrasi keuangan sekolah merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan, terutama di era Society 5.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi dan tuntutan transparansi yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, administrasi keuangan sekolah mencakup pengelolaan sumber dana, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban, serta berbagai problematika yang dihadapi. Keseluruhan aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

Dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat dilihat dengan perencanaan anggaran (RAPBS), pelaksanaan anggaran, pembukuan/pencatatan transaksi keuangan dan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Serata pertanggungjawaban keuangan sekolah di berikan bukti dalam bentuk pembuatan laporan keuangan berkala, tansparansi penggunaan dana, audit internal dan eksternal serta penyampaian laporan kepada stakeholders (komite sekolah, dinas pendidikan, dll). Selain itu kita juga memiliki problematika keuangan Sekolah mulai keterbatasan dana hingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas.

Sumber dana sekolah berasal dari berbagai saluran, termasuk dana rutin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumbangan dari komite sekolah, dan swadaya masyarakat. Pengelolaan yang efektif dari sumber-sumber ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal. Di era Society 5.0, teknologi digital memainkan peran kunci dalam pengelolaan keuangan. Sekolah dapat memanfaatkan sistem informasi keuangan

untuk melakukan analisis data yang lebih baik, sehingga dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien. Dengan adanya teknologi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah.

Pertanggung jawaban dalam administrasi keuangan sekolah menjadi semakin penting, terutama dalam konteks transparansi yang diharapkan oleh masyarakat. Sekolah perlu menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya mencakup laporan penggunaan anggaran, tetapi juga bagaimana dana tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih percaya terhadap pengelolaan keuangan sekolah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah.

Meskipun terdapat banyak kemajuan, administrasi keuangan sekolah di era Society 5.0 juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan keuangan dan teknologi. Banyak sekolah masih kekurangan tenaga ahli yang memahami pengelolaan keuangan dengan baik, yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah yang sering dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran, sehingga sekolah perlu beradaptasi dengan cepat untuk menjaga stabilitas keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Aulia, C. A., & Subandi. (2024). Supervisi pendidikan dalam manajemen administrasi keuangan sekolah. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 7.
- Amarullah, A., dkk. (2022). Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di era digital melalui pelatihan sertifikasi kompetensi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. *Jurnal Pendidikan*, 4(1), 479-481.
- Ardiana, N. M., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 31-35.
- Aziz, F., & Winarni, B. (2021). *Otomatisasi tata kelola keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Cholil. (2024). *Bimbingan & konseling sekolah madrasah*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur.
- Hendrian, S., Riko, & Candri, M. K. (2022). Sistem informasi administrasi keuangan sekolah berbasis Java desktop. *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, 2(3), 553.
- Jainudin, A., & Suroto. (2017). Analisis pengelolaan dan pengawasan keuangan sekolah di SD Negeri Sekecamatan Way Tuba. *Jurnal Pendidikan*, 4(3), 4.
- Karismawan, D. P., & Amrie Firmansyah. (2022). Apakah pelaku industri 5.0 menghilangkan profesi akuntan? *JurnalKu*, 2(3), 318.
- Lubis, J., & Haidir. (2019). *Administrasi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP.
- Muhsin, A., & Mulyanti, D. (2023). Manajemen keuangan sekolah: Tinjauan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *Jurnal Maisyatuna*, 4(1), 4-5.
- Nurhadi, & Sarah, R. K. (2023). Analisis pembiayaan lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 40.
- Nurochim. (2016). *Administrasi pendidikan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Prastiawan, A. A., Prastiawan, A., Gunawan, I., Putra, A. P., Surahman, E., Dewantoro, D. A., ... & Nuraini, N. L. S. (2019, December). Office management of educational institutions: Theories and applications. In *5th International Conference on Education and Technology (ICET 2019)* (pp. 758-762). Atlantis Press.

- Sahara, R., & Rayyan, F. (2024). Implementasi mobile application-based management information system at high school level. *I(4)*, 822-828.
- Salma, S. S., & Handoko, B. (2024). Analisis pengelolaan administrasi keuangan sekolah: Tinjauan terhadap kemampuan SDM dengan rangka jabatan pada MI Cigitung Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Masharif al-Syariah*, *9(2)*, 1054.
- Saputro, N. B. (2020). Perencanaan sistem informasi administrasi siswa pada SDIT Perjuangan Depok. *INTEGER: Jurnal of Information Technology*, *5(1)*.
- Sianturi, E., dkk. (2020). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Sidoarjo: PT Zifatma Jawara.
- Sudarmono, Hasibuan, L., & Anwarka. (2021). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *2(1)*, 268-269.
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4(1)*, 45-57.
- Suryana, E. (2019). *Administrasi pendidikan dalam pembelajaran*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Syukur, A., & Setiawan, A. (2021). Ruang lingkup dan fungsi administrasi pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an. *El-FAKHURU*, *1(1)*, 28-45.
- Trenggono, M. H., dkk. (2023). Urgensi aplikasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal of Information System and Management*, *2(6)*, 71-72.
- Wali, M., dkk. (2023). *Pembangunan berkelanjutan era industri 4.0 dan society 5.0*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.